

## **Efektivitas Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata Di Taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros**

**Abdul Sahid**

Administrasi Publik, STIA YAPPI Makassar

Email: [sahidsarome@gmail.com](mailto:sahidsarome@gmail.com)

**Ambo Masse**

Administrasi Publik, STIA YAPPI Makassar

Email: [kokongjunior128@gmail.com](mailto:kokongjunior128@gmail.com)

**Abstract.** *Maros is one of the district that has interesting tourist attractions known as waterfalls, so that for the sake of sustainability the role of the local government of Maros regency is needed. This type of research uses a qualitative approach, with a sample of 15 people consisting of employees, officers, and the community. Base on the results of the research, it shows that the government's role as a regulator is always balancing, between the wishes of tourists and tourist objects in bantimurung Nasional Park. A side from being a regulator, the government is also a facilitator, motivator, and dynamicator.*

**Keywords:** *Role, Increase.*

**Abstrak.** Maros salah satu kabupaten yang memiliki tempat wisata yang menarik, yang dikenal dengan air terjunnya, sehingga demi kelestariannya peranan pemerintah daerah kabupaten Maros sangat dibutuhkan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sampel 15 orang yang terdiri dari pegawai, petugas dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator yang selalu menyeimbangkan antara keinginan wisatawan dengan objek wisata yang ada di Taman Nasional Bantimurung. Disamping sebagai regulator, pemerintah juga sebagai fasilitator, motivator, dan sebagai dinamisator.

**Kata Kunci :** Peranan, Meningkatkan.

### **PENDAHULUAN**

Maros salah satu kabupaten yang memiliki tempat wisata yang terkenal dengan air terjunnya dan menjadikan sebagai sektor pariwisata, merupakan andalan perekonomian daerah yang berbasis sumber daya alam, budaya yang lestari dan agamais, Kabupaten Maros menjadikan Taman Nasional Bantimurung atau biasa disebut *Kingdom Of Butterfly* sebagai tempat wisata unggulan. Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Maros juga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Pemerintah Kabupaten Maros berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan objek – objek pariwisata daerah sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan.

Agar kunjungan dapat meningkat peningkatan perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten Maros. Terdapat beberapa tempat wisata di Kabupaten Maros. Salah satunya adalah Taman Nasional Bantimurung yang terletak di kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros sekitar 12 km dari pusat kota Kabupaten Maros. Taman Nasional Bantimurung adalah salah satu obyek wisata yang terkenal di Kabupaten Maros. Meskipun di Kabupaten Maros memiliki sejumlah potensi wisata alam yang dapat diandalkan, namun wisata Taman Nasional Bantimurunglah yang lebih menarik, karena objek wisata yang ada di Taman Nasional Bantimurung lebih banyak mulai dari Wisata Alam Pegunungan, Taman Kupu-Kupu, Gua Batu, Air Terjun Bantimurung disamping itu tempat wisata mudah dijangkau, sarana dan prasana yang memadai sehingga lebih banyak wisatawan yang datang meningkat, inilah yang menjadi daya tarik tersendiri Wisata Alam Bantimurung yang sangat diunggulkan dipemerintahan Kabupaten Maros.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut *Sondang* dalam *othenk* (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. *Abdurahmat* dalam *Othenk* (2008: 7).

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut *Poerdarminta* (2003) peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, jadi peran merupakan suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan

Rivai (2006:148) mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis

dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

Soekanto (2005:268) mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran-peran itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat, maksudnya: kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh “masyarakat” didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peran-peran lainnya.

Menurut *Ndraha* (2003:6) pemerintah adalah Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.

Menurut Montesquieu dalam Salam (2004:35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama trias politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan Undang-Undang).

Menurut Arif (2012: 66) peran pemerintah daerah ada empat yaitu :

1. Sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.
2. Sebagai dinamisator, pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembanguana daerah).
3. Sebagai fasilitator, Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
4. Sebagai motivator, Motivator yaitu Fungsi Pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih berdasarkan pada fenomena dan berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa (*Pasolong 2013:161*).

### **Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Balai Taman Nasional Bantimurung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Maros. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan April 2022 sampai bulan Mei 2022.

### **Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Balai Taman Nasional Bantimurung serta masyarakat Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Sample yang diambil pada penulisan ini yaitu purposive sample dimana penulis mengambil sampel dari populasi pegawai, Petugas dan Masyarakat yang berjumlah 15 orang yang diyakini dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu:

1. Data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data Sekunder, Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

### **Fokus Penelitian.**

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui peran pemerintah serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi wisata alam di taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros.

### **Teknik Pengukuran Data.**

1. Observasi. Teknik ini dilakukan dengan jalan mengamati dan mencatat secara langsung di lokasi penelitian atas gejala-gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan petunjuk yang dibutuhkan.

2. Wawancara. Dimana terjadi proses interaksi dan komunikasi antara pewawancara dengan responden atau informan untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terdapat dalam rumusan masalah.
3. Dokumentasi. Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam.

### **Tehnik Analisi Data**

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah diruliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan *Miles dan Huberman* (Moleong, 2001) terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti, tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya.

### **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros, bahwa peran pemerintah sebagai regulator selalu menyeimbangkan antara keinginan

wisatawan dengan objek wisata yang ada di Taman Nasional Bantimurung, dan setiap wisatawan selalu diutamakan dengan kenyamanan setiap berwisatawan di Taman Nasional Bantimurung dengan sepuasnya wahana-wahana yang selalu menarik untuk di kunjungi dan setiap program pembangunan juga selalu melibatkan pihak masyarakat dan bagaimana pemerintah melakukan perannya yaitu memberdayakan wisata alam yang ada dan melakukan pembangunan untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Setiap pelaksanaan pembangunan atau program yang dilakukannya pihak Dinas kebudayaan dan pariwisata ini sesuai dengan Peraturan dan keinginan wisatawan bahwa secara umum peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Kemudian diperjelas kembali oleh *Staf*. Dinas kebudayaan dan pariwisata bahwa:

“Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan baik itu akses jalan ke lokasi wisata ataupun pengembangan wahana ataupun tempat untuk berwisata di Taman Nasional Bantimurung pemerintah selalu menyeimbangkan antara kebutuhan wisatawan dan bagaimana masyarakat mampu dibina dan kemudian mampu bekerja sama dengan baik dan adanya kerja sama antar instansi pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan beberapa instansi lainnya, sehingga wisata yang disajikan bukan hanya wisata alam akan tetapi ada wisata lain seperti wisata bahari, dan masih banyak lagi sehingga pengunjung merasa nyaman dan merasa ingin tinggal lama”

Kemudian diperjelas kembali oleh beberapa pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros terkait masalah peran pemerintah sebagai regulator bahwa:

“Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu memperhatikan pembangunan akses jalan dan pengembangan objek wisata dengan kebutuhan wisatawan agar wisatawan merasa nyaman ketika ingin ke lokasi objek wisata, seperti pembangunan akses jalan sekitaran Taman Wisata Bantimurung, pembangunan wahana Maros Waterpark dan masih banyak lagi, pemerintah tidak serta merta membangun objek wisata begitu saja akan tetapi selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh para pengunjung”.

Berdasarkan hasil wawancara oleh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Maros, bahwa peran pemerintah sebagai regulator sangat baik karena dalam setiap pembangunannya pemerintah selalu memperhatikan apa -apa saja yang dibutuhkan oleh wisatawan sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Data yang dihimpun dari informan untuk variable ini dengan indikator peran pemerintah sebagai Regulator prosedur-prosedur yang jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan peran pemerintah sebagai Regulator sebagai berikut ini:

“Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan wahana ataupun tempat untuk berwisata di Taman Nasional Bantimurung pemerintah selalu menyeimbangkan antara kebutuhan wisatawan dan bagaimana masyarakat mampu dibina dan kemudian mampu bekerja sama dengan baik sehingga pelayanan kepada wisatawan berjalan dengan baik dan mendapat respon baik dari wisatawan dan tidak keluar dari aturan pemerintah daerah yakni Peraturan Bupati Maros Nomor : 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros.

### **Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Data yang dihimpun dari informan untuk variable ini dengan indikator peran pemerintah sebagai Fasilitator prosedur-prosedur yang jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Seperti yang dikemukakan diatas bahwa kondisi wisata Taman Nasional Bantimurung merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan menjadi sebagai tempat wisata percontohan yang menyediakan berbagai kenikmatan wisata yang serba ada.

Kemudian diperjelas kembali oleh Staf. Dinas kebudayaan dan pariwisata bahwa: ”Dalam peran pemerintah sebagai Fasilitator, dinas kebudayaan dan pariwisata bekerja ekstra untuk menciptakan berbagai macam sarana prasarana wahana atau wisata supaya pengunjung merasa nyaman dalam berwisata di Taman Nasional Bantimurung dan menikmati jamuan fasilitas wisata yang berbeda-beda. ” Ini sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pedoman kerja bagi seluruh satuan unit kerja lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang lebih sistematis dan terarah sehingga pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dapat

diukur dengan mudah. Ini sesuai dengan pembangunan wahana atau wisata yang di Taman Nasional Bantimurung, jadi setiap pembangunan yang dilaksanakan di di Taman Nasional Bantimurung tidak pernah terlepas dari rencana sebelumnya.

### **Peran Pemerintah Sebagai Motivator**

Motivator yaitu Fungsi Pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada aparatur pemerintah dan masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Data yang dihimpun dari informan untuk variable ini dengan indikator peran pemerintah sebagai Motivator, prosedur-prosedur yang jelas tampak pada jawaban informan tersebut.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait dengan peran pemerintah sebagai motivator sebagai berikut ini:

“Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah selalu memberikan support atau dorongan baik kepada aparatur pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun masyarakat disekitar Taman Nasional Bantimurung, agar ikut serta memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang datang melalui keramahan, dan hal-hal yang bersifat positif supaya mereka selau merasa nyaman dengan kondisi wista yang begitu nyaman, memberikan pelayanan dan keramahan para aparatur dan masyarakat sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung. Inilah sangat penting dalam masalah kepariwisataan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan”.

### **Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Data yang dihimpun dari informan untuk variable ini dengan indikator peran pemerintah sebagai Dinamisator, prosedur-prosedur yang jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan peran pemerintah sebagai Dinamisator sebagai berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros, bahwa peran pemerintah sebagai Dinamisator sudah terlaksana dengan baik karena setiap pelaksanaan pembangunan objek wisata di Taman Nasional Bantimurung selalu melibatkan instansi pemerintahan lain jadi tidak diragukan lagi bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu mengikut sertakan instansi pemerintah lain demi mengembangkan objek

wisata di Taman Nasional Bantimurung. Kemudian kerja sama pemerintah dengan masyarakat, pemerintah selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat melalui badan penyeluh untuk mendampingi masyarakat betapa pentingnya menjaga dan mengembangkan objek wisata Taman Nasional Bantimurung.

Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Peran pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Taman Wisata Bantimurung Kabupaten Maros dengan indicator berdasarkan penelitian penulis, bahwa indikator peran pemerintah sebagai regulator, sudah maksimal karena pemerintah mampu melibatkan instansi lain untuk mencapai tujuan sesuai dengan bahan acuan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah terlaksana sebagaimana pemerintah mampu memberikan fasilitas- fasilitas seperti Hotel, dan berbagai wahana dan wisata lainnya.

## **SARAN**

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan agar peran pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dapat terus menerus meningkat dan disempurnakan, maka perlu memperoleh umpan balik dari para wisatawan yang datang di Taman Wisata Bantimurung Kabupaten Maros. Potensi wisata yang terdapat di Taman Nasional Bantimurung perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi seperti wisata alamnya dan wisata tumbuhan (ekowisata), sedangkan sarana dan prasarananya masih perlu adanya penambahan wahana-wahana permainan agar wisatawan lebih tertarik lagi untuk berkunjung ke Taman Wisata Bantimurung

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arif, 2012. *Konsep Pemerintahan*. Jakarta: SalembaTeknika.

Damanik, J dan Weber, H. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset

Fandeli Chafid, 1999. *Dasar-dasar ManajemenKepariwisataalam*. Yogyakarta: Liberty

- Karyono, A Hari. 1997. Kepariwisataaan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Moleong, Lexy, 2007, Metodologi penelitian Kualitatif; Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybermology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
- Rivai, Veitzhal, 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT.
- Salam, Dharma Setyawan, 2004, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Djambatan
- Soekadijo, 1997. Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Syafi'inu, Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: PT. Refrka Aditama.
- Wahab, Salah, 2003, Manajemen Kepariwisataaan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Yoeti, Oka A, 2001. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/Menhut-H/2004 tanggal 18 Oktober 2001 Tentang Bantimurung sebagai Taman Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengembangan potensi pariwisata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem